

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia dalam upaya memberikan fasilitas infrastruktur yang dapat digunakan masyarakat tentunya tidak terlepas dari peran perusahaan yang mengerjakan proyek pembangunan (kontraktor). Banyaknya konstruksi pembangunan di Indonesia secara tidak langsung menunjukkan bahwa kian meningkatnya persaingan antara perusahaan jasa konstruksi maupun kontraktor dalam menjalankan proyek pembangunan. Namun semakin banyaknya perusahaan jasa konstruksi disisi lain semakin banyak pula proyek pembangunan yang terbengkalai yang diakibatkan minimnya modal kerja yang dimiliki perusahaan. Sehingga setiap perusahaan konstruksi dituntut untuk memiliki keunggulan tersendiri dalam mengelola, melaksanakan dan mengawasi aktivitas kegiatan operasional perusahaan disamping bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Industri konstruksi dapat dikategorikan sebagai salah satu industri yang berperan penting pada proses pembangunan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari segi potensi lapangan kerja, kebutuhan material, dan dampaknya peraturan publik yang mendukung ekonomi, dan termasuk dampak perluasan industri konstruksi terhadap ekonomi. Lowe (2003) menyatakan bahwa kontribusi industri konstruksi terhadap total *Gross Domestic Product* (GDP) suatu negara maju kurang lebih 7% - 10%. Adapun di negara yang sedang berkembang,

industri konstruksi menghasilkan 3% - 6% dari total GDP. Industri konstruksi juga memberikan kontribusi kepada pembukaan lapangan kerja serta distribusi pendapatan bagi masyarakat lapisan bawah (Lopes, 1997).

Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan dari pengelolaan dan penggunaan sistem pembayaran yang diterapkan pada perusahaan. Di zaman era globalisasi sekarang ini tentunya hampir semua orang telah menggunakan fasilitas perbankan dalam melakukan transaksi. Begitu pula dengan perusahaan yang memanfaatkan fasilitas perbankan tersebut dalam mempermudah kegiatan operasional perusahaannya. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan persetujuan pemberian pinjaman dalam kategori pinjaman yang diberikan Bank kepada perusahaan, dimana menunjukkan pada tahun 2014 pemberian pinjaman bank kepada perusahaan mencapai sebesar Rp 90,603 Miliar sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup drastis mencapai Rp 117,128 Miliar (Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI)). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengguna sistem pembayaran nontunai setiap tahun semakin meningkat.

Salah satu dampak dari perkembangan dan kemajuan sistem pembayaran yang demikian pesatnya merupakan peluang bagi setiap perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya dengan memanfaatkan fasilitas sistem pembiayaan nontunai dalam pembayaran kepada rekanan. Meskipun selama ini transaksi tunai sudah sangat familiar dalam kegiatan sehari-hari, namun belakangan ini perkembangan teknologi sistem pembayaran memungkinkan menggunakan instrumen pembayaran nontunai untuk memudahkan transaksi dalam kegiatan perusahaan terutama dalam pengadaan barang dan jasa secara

kredit. Bank Indonesia berupaya mendorong penggunaan transaksi nontunai dikarenakan transaksi nontunai lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat (liputan6.com).

Penerapan sistem pembayaran yang baik akan mempengaruhi *profitabilitas* perusahaan. Sehingga setiap perusahaan konstruksi harus memiliki sistem yang dapat digunakan untuk mengelola, melaksanakan dan mengawasi aktivitas kegiatan operasional perusahaan. Salah satu sistem yang dapat menunjang kemajuan perusahaan adalah penerapan sistem pembayaran hutang. Hutang usaha timbul dari pembelian persediaan barang material atau adanya proyek pekerjaan jasa yang berhubungan dalam kegiatan usaha dengan cara kredit yang diperoleh dari para kreditur (rekanan).

Hutang yang dikelola dengan baik secara tidak langsung akan terlihat pada arus kas yang dimiliki perusahaan. Jika perusahaan menggunakan pembiayaan pihak ketiga dalam mengelola pembayaran hutang kepada rekanan (*supplier*) maka perusahaan dapat memanfaatkan kas yang dimilikinya untuk dijadikan *asset* perusahaan maupun digunakan dalam memenuhi kebutuhan kegiatan operasional yang lainnya. Dari laporan arus kas perusahaan akan terlihat bagaimana kestabilan saldo kas yang dimiliki perusahaan dengan memperhatikan saldo hutang yang dimiliki sebagai dasar penilaian kemampuan perusahaan dalam mengelola hutangnya.

Sebagian perusahaan jasa konstruksi di Indonesia tidak semuanya menggunakan pembiayaan pihak ketiga, beberapa perusahaan menggunakan cara lain dalam sistem pembayaran hutang yang timbul dari pembelian bahan material

dari rekanan dengan cara melunasinya secara tunai (*payment cash*) tanpa menggunakan jasa pembiayaan perbankan dalam pembayaran hutangnya.

PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi menerapkan sistem pembayaran nontunai atau pembiayaan pihak ketiga dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank untuk melunasi hutangnya kepada rekanan. Fasilitas ini lebih dikenal dengan fasilitas *Supply Chain Financing* (SCF) untuk membiayai pembayaran operasional perusahaan setiap proyek serta menjamin keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Dalam penerapannya akan berdampak pada perputaran arus kas perusahaan.

Penggunaan sistem manapun dalam pembayaran kepada rekanan perbedaannya akan terlihat dalam penyajian arus kas perusahaan, namun dengan penggunaan fasilitas *Supply Chain Financing* (SCF) akan mempengaruhi *surplus/defisit* pada arus kas proyek. Sehingga perlu adanya penelitian dalam perbedaan penggunaan pembayaran nontunai (SCF) dengan pembayaran tunai (*payment cash*) terhadap realisasi penyusunan arus kas pada perusahaan jasa konstruksi. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Penggunaan Fasilitas Supply Chain Financing (SCF) Terhadap Arus Kas Proyek pada PT Brantas Abipraya (Persero)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran SCF pada PT Brantas Abipraya agar pembayaran kepada rekanan berjalan efektif ?
2. Apakah penggunaan fasilitas *Supply Chain Financing* (SCF) dalam melakukan pembayaran kepada rekanan mempengaruhi keseimbangan dan kelancaran arus kas proyek ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perbedaan pengelolaan sistem pembayaran hutang rekanan dengan menggunakan fasilitas *Supply Chain Financing* dan *Payment Cash* serta pengaruhnya terhadap arus kas proyek;
- b. Mengetahui apakah penggunaan SCF mempengaruhi surplus/defisit arus kas proyek;
- c. Untuk mengetahui mekanisme penerbitan dan pembayaran SCF pada perusahaan jasa konstruksi;

B. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan tentang sistem pembayaran yang diterapkan proyek perusahaan jasa konstruksi dan mengetahui fasilitas pembiayaan perbankan, serta mendapat pengalaman yang berguna untuk menyusun laporan tugas akhir.

b. Bagi Pihak Perusahaan

Dapat berguna dalam menilai sistem pembiayaan yang tepat untuk diterapkan pada perusahaan sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi manajemen dalam menentukan fasilitas pembiayaan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan dimasa yang akan datang.

c. Bagi Pihak Lain

Dapat menambah pengetahuan sehingga dapat dijadikan bahan acuan atau referensi dalam penelitian lebih lanjut.